

# Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sumartin Selfina Lona<sup>1\*</sup>, M. E. Perseveranda<sup>2</sup>, Henny A. Manafe<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[thinylona@gmail.com](mailto:thinylona@gmail.com), [perseverandaerse@gmail.com](mailto:perseverandaerse@gmail.com), [hennyunwira@gmail.com](mailto:hennyunwira@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 29 Januari 2023

Disetujui : 30 Januari 2023

Dipublikasi : 31 Januari 2023

## ABSTRACT

*The objective of this study was to understand the economical, efficient and effective implementation of the State Revenue and Expenditure Budget at the government institution. Data sources used in this study are financial reports especially budget ceiling and budget realization between the period of 2017 and 2021 fiscal year was obtained from The Online Monitoring of the State Accounting Treasury System, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The descriptive and comparative analyses were employed in this study. The results of the research show that Economic level in 2017-2021 fiscal year utilisation felt into the economical category as shown by the percentage of budget realization was less than 100% (<100%). The effective level of achievement for non-tax state income realisation between 2017 and 2021 fiscal year felt into a very effective criteria with the effective ratio was 103.62%; while that for the expenditure felt into a sufficient effective criteria with an average effective ratio was 91.30%. Cost efficiency ratio/expenditure realization to achieve the maximum revenue in the period of 2017 – 2021 suits for a very efficient category with the ratio for each fiscal year was less than 19%; thus economical, efficient and effective implementation of State Revenue and Expenditure Budget must continue to be improved.*

**Keywords:** Budget realization; Economical; Financial Accountability

## PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah Negara adalah anggaran pendapatan dan belanja (Ariel et al., 2022). Di bidang ekonomi anggaran bukan hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi belanja digunakan sebagai alat kebijakan (Fanggidae & Manafe, 2019). Pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh (Rusmita, 2016). Belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran tertentu dikenal dengan laporan keuangan pemerintah (Susanti et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, APBN sering menimbulkan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang transparan (Rusmita, 2016), (Susanti et al., 2021). Bentuk dari konflik yang sering terjadi antara lain pembohongan publik atau yang sering dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Susanti et al., 2021).

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia dan departemen-departemennya sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atau public (Abdullah, 2017). Menurut (Bastian, 2019), Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup mencatat, mengklarifikasi dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam

pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Saat ini sektor publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas, profesionalisme serta memperhatikan *value for money* (Herawati, 2013), (N. C. F. Sari, 2014), (ASRINI, 2020). Dalam pelaksanaan APBN, akuntansi sektor publik sangat penting dimana adanya transparansi aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan anggaran, dimana pemerintah dituntut untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (Gunawan, 2016), (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Dalam akuntansi publik, pemerintah diwajibkan mengelola sumberdaya-sumberdaya publik yang ada dan melaporkannya kepada masyarakat sehingga pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan yang dilakukan harus secara efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*) serta partisipatif dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maka satuan kerja dan pemerintah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan secara umum. Abdullah (2017), mendefinisikan Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Yang menjadi masalah rutin pengelolaan anggaran setiap tahun anggaran adalah rendahnya serapan atau realisasi anggaran, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja pada kementerian/lembaga selalu menunjukkan pola belanja dengan menunjukkan serapan anggaran yang masih sangat rendah pada semester I dan menumpuk di semester II dan bahkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi bukan karena efisiensi pengelolaan belanja tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang belum efektif, dimana pengelolaan anggaran belum optimal pada setiap tahun anggaran (Sinaga, 2016), (Ruhmaini et al., 2018), (Salwah, 2019).

Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Vokasi di NTT yang merupakan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagai lembaga pemerintah, Politani Kupang mengelola dana pemerintah yang terwujud melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelolaan anggaran dan keuangan perlu dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif menurut standar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dengan kata lain, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Rahayu, 2022). Gambaran tentang pengelolaan anggaran di Politani Kupang sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban sebagai salah satu lembaga public.

## STUDI LITERATUR

Anggaran menurut Mardiasmo (2009:61) merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan kata lain, anggaran (*budget*) merupakan rencana kegiatan suatu organisasi yang tertulis dan dinyatakan secara kuantitatif untuk periode tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang serta barang dan jasa. Efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132) berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Selain itu, Mahmudi (2007) mendefinisikan bahwa efisiensi belanja adalah analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) berhubungan dengan pencapaian tujuan/target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana kegiatan operasional dikatakan

efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan (*spending wisely*).

Anggaran di sektor publik penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*) dan *trade off*; dan anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat (Susanti, Annis, Riadi Septa, 2021). Anggaran bagi sektor publik seyogyanya dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik. Akan tetapi seringkali pengelolaan anggaran terutama milik pemerintah tidak dikelola dengan baik dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan adanya korupsi, Kolusi, dan Nepotime. Berbagai penelitian terhadap pengelolaan anggaran sector public telah dilakukan oleh berbagai pihak. Ada yang hasilnya berupa pengelolaan yang baik, tetapi tidak jarang juga ada pengelolaan yang kurang ekonomis, efektif dan efisien.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2011-2014 dilakukan oleh (Untari, 2015). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan dana (anggaran) diminimalkan dengan harapan manfaat yang didapat dari jenis program dan kegiatan dalam belanja langsung semakin baik (*spending well*). Tingkat efektifitas dalam belanja langsung tahun 2011-2014 pencapaian dari belanja langsung sudah efektif. Dinas Pendidikan Kota Semarang berhasil melaksanakan program/kegiatan dalam belanja langsung sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang.

Aulia & Nugraheni (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2017-2021 melalui analisis *Value for Money*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui situs website PPID Pemerintah Kota Semarang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan menyebutkan bahwa hasil pengukuran rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.

Sari & Baku (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, serta efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis pendapatan dan belanja daerah melalui laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif dan Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

Syamsuddin et al., (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui realisasi dan kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Alat analisis yang digunakan yaitu alat analisis kinerja belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif dan efisien, namun dalam hal keserasian belanja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan belanja modal.

### METODE

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang berlokasi di Jln. Prof. DR. Herman Yohanes Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penelitian ini

berfokus pada Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun anggaran 2017-2021.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis serta membandingkan target dengan realisasi anggaran sesuai dengan teori yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada data-data *numeric* (angka) sehingga hasil yang akan diperoleh adalah hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti dan kesimpulannya akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data dan mengambil kesimpulan. Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan tentang pengelolaan keuangan Negara; dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yakni data dari OMSPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data e-rekon Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta data realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada aplikasi SAS Politeknik Pertanian Negeri Kupang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

### Analisis Data

Peneliti mengukur tingkat ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2017-2021 ini dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Belanja)}}{\text{Anggaran/Pagu Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Ekonomis menurut Mahsum (2012:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) artinya ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) artinya ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) artinya tidak ekonomis

Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran pendapatan dikalikan dengan 100%. Perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran kriteria efektivitas mengacu pada kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagaimana yang ada pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Presentasi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2006:143)

Untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (*output*) dengan realisasi anggaran pendapatan (*input*). Menurut Mahmudi (2006) tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh PNB (Output)}}{\text{Realisasi PNB (Input)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efisiensi pelaksanaan APBN pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang mengacu pada pengukuran kriteria seperti tertera dalam tabel 2.

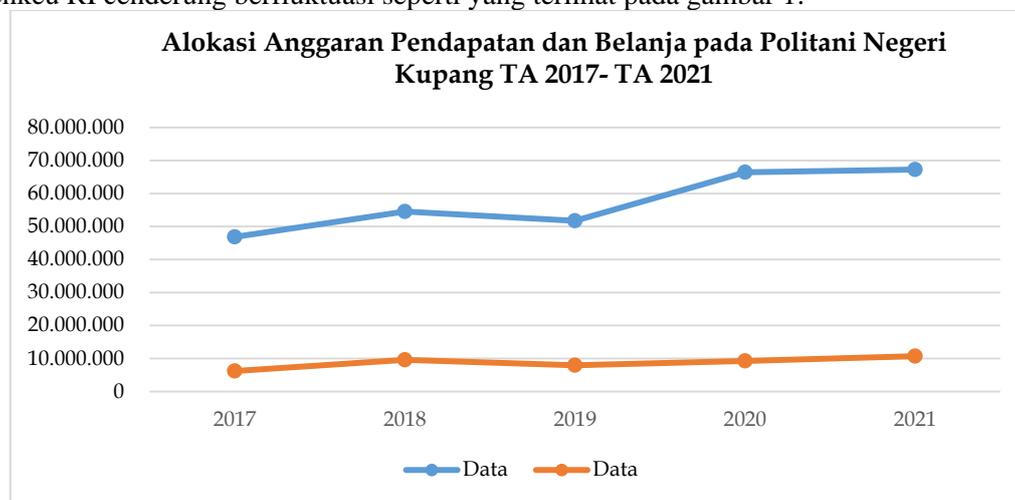
Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2006:143)

### HASIL

Data pagu anggaran pendapatan dan belanja yang diperoleh Satuan Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 berdasarkan data dari OmSPAN Kemenkeu RI cenderung berfluktuasi seperti yang terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politani Negeri Kupang  
 Sumber: Data OMSPAN Kemenkeu RI

Berikut informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja serta realisasi anggaran pada Politani Negeri Kupang periode tahun anggaran 2017-2021 yang menunjukkan kenaikan realisasi anggaran. Realisasi anggaran pendapatan terkecil yakni pada tahun 2018 yaitu 88,31% dan realisasi anggaran terbesar pada periode tahun anggaran 2019 yaitu 116,40%. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja terkecil adalah di periode TA. 2020 yaitu 86,76% dan realisasi anggaran terbesar pada tahun anggaran 2019 yaitu 95,69%. Hal ini dapat dilihat pada persentase data realisasi pendapatan dan belanja Negara periode tahun anggaran 2017 dengan tahun anggaran 2021 dalam tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2021 (Politeknik Pertanian Negeri Kupang, 2022)

Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	6,205,106,000	6,657,077,968	107.28	46,863,378,000	42,518,219,405	90.73
2018	9,576,695,000	8,456,999,429	88.31	54,519,904,000	50,952,631,025	93.46
2019	7,952,705,000	9,257,156,632	116.40	51,721,797,000	49,490,392,601	95.69
2020	9,250,419,000	9,501,729,126	102.72	66,415,038,000	57,619,982,575	86.76

2021	10,716,580,000	11,411,899,314	106.49	67,253,765,000	61,235,886,146	91.05
------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	-------

Sumber: *Pengolahan data LRA Politani Negeri Kupang (2022)*

Grafik penyerapan anggaran pendapatan dan belanja yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Sumber : *Pengolahan data LRA Politani Negeri Kupang (2022)*

## PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Ekonomis

Dalam menganalisis tingkat ekonomis maka akan dilakukan pengukuran tingkat penghematan penggunaan anggaran atau realisasi pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk mengukur tingkat penghematan pengeluaran-pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana terlihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Ekonomis Penggunaan Anggaran tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun	Perhitungan	Persentasi	Capaian
Tingkat Ekonomis	2017	$\frac{42.518.219.405}{46.863.378.000} \times 100$	90,73	Ekonomis
	2018	$\frac{50.952.631.025}{54.519.904.000} \times 100$	93,46	Ekonomis
	2019	$\frac{49.490.392.601}{51.721.797.000} \times 100$	95,69	Ekonomis
	2020	$\frac{57.619.982.575}{66.415.038.000} \times 100$	86,76	Ekonomis
	2021	$\frac{61.235.886.146}{67.253.765.000} \times 100$	91,05	Ekonomis
Kriteria Ekonomis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Nilai kurang dari 100% ( <math>x &lt; 100\%</math> ) berarti ekonomis</li> <li>• Jika Nilai sama dengan 100% ( <math>x = 100\%</math> ) berarti ekonomi berimbang</li> <li>• Jika Nilai lebih dari 100% ( <math>x &gt; 100\%</math> ) berarti tidak ekonomis</li> </ul>				

Sumber: *Pengolahan Data sekunder oleh penulis (2022)*

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran pengeluaran/anggaran belanja Satuan Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 termasuk dalam kategori ekonomis dimana capaian realisasi anggaran belanja masih berada dibawah standar capaian ekonomis sebesar 100%. Hal ini terlihat pada capaian realisasi belanja

tahun 2017 sebesar 90,73%, capaian realisasi belanja tahun 2018 sebesar 93,46%, capaian realisasi belanja tahun 2019 sebesar 95,69%, capaian realisasi belanja tahun 2020 sebesar 86,76% dan capaian realisasi anggaran belanja sebesar 91,05%.

Hal ini menunjukkan bahwa Politani Negeri Kupang mampu melakukan penghematan penggunaan anggaran belanja setiap tahunnya. Yang dimaksud dengan penghematan disini adalah penggunaan/realisasi anggaran belanja sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada program tambahan yang dapat menimbulkan adanya peningkatan anggaran belanja yang mengakibatkan pengeluaran melebihi jumlah dana/anggaran yang ditargetkan sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan tingkat ekonomi realisasi anggaran tahun 2017 sampai tahun 2021, maka dapat ditunjukkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Ekonomisasi Anggaran Tahun 2017-2021

	Tahun					Perubahan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tingkat Ekonomis	90,73	93,46	95,69	86,76	91,05	2,73	2,23	-8,93	4,29

Sumber: *Pengolahan Data sekunder oleh penulis (2022)*

Berdasarkan data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ekonomis penggunaan/realisasi anggaran yang fluktuatif yakni realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2,73%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 2,23% sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,93%, tetapi realisasi anggaran kembali mengalami peningkatan lagi dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,29%.

#### Analisis Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Realisasi Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan dan realisasi belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung. Satuan Kerja sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi anggaran pendapatan (PNBP) agar mampu membiayai belanja kegiatan operasional dan pendukung pembelajaran di tahun berikutnya. Sedangkan Efektivitas realisasi pelaksanaan anggaran dianggap perlu karena mencerminkan satuan kerja mampu mencapai target.

Rasio efektivitas anggaran pendapatan dan belanja pada Politani Negeri Kupang periode TA 2017 sampai dengan TA 2021 terlampir dalam tabel 6.

Tabel 6. Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Pendapatan (PNBP)			Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
2017	6.205.106.000	6.657.077.968	107,28	46.863.378.000	42.518.219.405	90,73
2018	9.576.695.000	8.456.999.429	88,31	54.519.904.000	50.952.631.025	93,46
2019	7.952.705.000	9.257.156.632	116,40	51.721.797.000	49.490.392.601	95,69
2020	9.250.419.000	9.501.729.126	102,72	66.415.038.000	57.619.982.575	86,76
2021	10.716.580.000	11.411.899.314	106,49	67.253.765.000	61.235.886.146	91,05
Jumlah (Σ)	43.701.505.000	45.284.862.469	103,62	286.773.882.000	261.817.111.752	91,30

Sumber: *Pengolahan Data sekunder oleh penulis (2022)*

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan/realisasi anggaran belanja pada Politani Negeri Kupang periode tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 91,30% sehingga masuk dalam kriteria cukup efektif. Sedangkan

efektivitas realisasi anggaran pendapatan adalah sebesar 103,62% dan masuk dalam kriteria Sangat Efektif. Hasil perhitungan capaian efektivitas pendapatan untuk tahun anggaran 2017, 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 107,28%, 116,40%, 102,72% dan 106,49% dan masuk dalam kategori Sangat Efektif dimana realisasi penerimaan melebihi 100% dari target penerimaan PNBPN. Sedangkan untuk TA 2018 realisasi PNBPN hanya sebesar 88,31% atau di nilai masih dibawah standar efektivitas pendapatan sehingga capaiannya dinilai dalam kategori kurang efektif dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 9.576.695.000,- tetapi hanya dapat direalisasi sebesar Rp. 8.456.999.429,-.

Pada hasil perhitungan capaian efektivitas realisasi belanja untuk tahun anggaran 2017-2019 dan TA 2021 masuk dalam kategori cukup efektif karena capaiannya berada pada range 90% - 99% sedangkan capaian efektivitas realisasi anggaran belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni hanya mencapai 86,76% dan berada pada range 75%-89%. Hal ini disebabkan oleh dampak virus corona yang mendunia dan pemerintah mengumumkan agar *lockdown* sehingga beberapa program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran belanja tidak dapat direalisasikan dengan maksimal terutama kegiatan kemahasiswaan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dihentikan. Untuk mengetahui perkembangan tingkat efektivitas penggunaan anggaran pendapatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Efektivitas Pendapatan tahun 2017-2021

Keterangan	Pendapatan								
	Tahun					Perubahan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tingkat Efektivitas	107,28	88,31	116,40	102,72	106,49	-19	28,09	-13,7	3,77

Sumber: Pengolahan Data sekunder oleh penulis tahun 2022

### Analisis Efisiensi Realisasi Pengeluaran untuk memperoleh PNBPN

Pengukuran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi realisasi pengeluaran dana yang bersumber dari PNBPN untuk memperoleh Pendapatan (PNBPN). Saat ini Pemerintah sangat mengharapkan adanya realisasi anggaran yang efisien. Untuk mengetahui efisiensi realisasi pengeluaran (*output*) agar memperoleh pendapatan/PNBPN (*input*) yang maksimal, maka dilakukan analisis perhitungan sebagaimana pada tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan Tingkat Efisiensi Biaya Tahun 2017 s/d 2021

Keterangan	Tahun	Perhitungan	Persentasi	Capaian	
Tingkat Efisiensi	2017	4.588.178.569	X 100%	0,69	Sangat Efisien
		6.657.077.968			
	2018	8.706.836.008	x 100%	1,03	Sangat Efisien
		8.456.999.429			
	2019	6.971.749.403	x 100%	0,75	Sangat Efisien
		9.257.156.632			
	2020	7.816.069.604	x 100%	0,82	Sangat Efisien
		9.501.729.126			
	2021	8.941.163.647	x 100%	0,78	Sangat Efisien
		11.411.899.314			

Sumber : Pengolahan Data sekunder oleh penulis (2022)

Dari tabel perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran/penggunaan dana yang bersumber dari PNBPN untuk memperoleh PNBPN pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2017 s/d 2021 termasuk dalam kategori Sangat Efisien, hal ini dikarenakan capaian realisasi biaya yang bersumber dari PNBPN untuk memperoleh PNBPN kurang dari 10% (<10%). Dari tabel perhitungan tersebut juga terlihat efisiensi biaya pada tahun 2017 mencapai 0,69%, capaian realisasi biaya untuk memperoleh PNBPN pada tahun 2018 sebesar 1,03%, pada tahun 2019, capaian realisasi biaya yang bersumber dari PNBPN untuk memperoleh PNBPN adalah sebesar 0,75%, efisiensi realisasi biaya PNBPN untuk memperoleh PNBPN di tahun 2020 sebesar 0,82% dan capaian realisasi biaya yang bersumber dari PNBPN untuk memperoleh pendapatan (PNBPN) di tahun 2021 adalah sebesar 0,72%. Dan untuk mengetahui perkembangan tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang sejak tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel 9:

Tabel 9. Perkembangan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun					Perubahan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tingkat Efisiensi	0.69	1.03	0.75	0.82	0.78	0.34	-0.28	0.07	-0.04

Sumber : *Pengolahan Data sekunder oleh penulis (2022)*

Berdasarkan tabel di atas maka data-data menunjukkan bahwa efisiensi biaya mengalami perubahan yang berfluktuasi dimana pada tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 0,34%, untuk tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28%, sedangkan perubahan efisiensi biaya dari tahun 2019 ke tahun 2020 kembali meningkat sebesar 0,07%, tetapi perubahan kembali mengalami penurunan efisiensi biaya sebesar 0,04% dari tahun 2020 ke tahun 2021.

### KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja yang diberikan kepada Satuan Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode TA 2017 s/d TA 2021 cenderung berfluktuasi baik itu kenaikan ataupun penurunan untuk setiap tahun anggaran. Pada pengukuran rasio/kriteria ekonomis menunjukkan bahwa penggunaan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode TA 2017- TA 2021 masuk dalam kategori “ekonomis” hal ini ditunjukkan dengan nilai persentasi realisasi anggaran kurang dari 100% (<100%). Untuk pengukuran tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja, capaian efektivitas realisasi atas pendapatan (PNBPN) “sangat efektif” dimana realisasi penerimaan PNBPN melebihi 100% dari target yaitu sebesar 103,62%. Sedangkan untuk capaian efektivitas realisasi belanja masuk dalam kategori “cukup efektif” karena capaiannya hanya sebesar 91,30%. Capaian efektivitas realisasi anggaran terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yang hanya mencapai 86,76% dikarenakan pandemic covid-19 sehingga banyak program kegiatan yang tidak bisa realisasikan. Analisis pengukuran tingkat efisiensi biaya/realisasi pengeluaran (*output*) untuk memperoleh pendapatan (*input*) yang maksimal periode TA 2017 – TA 2021 masuk dalam kategori “sangat efisien” dengan nilai rasio setiap tahun anggaran adalah kurang dari 10% (<10%).

### REFERENSI

- Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja*, 8(2), 209–210. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Ariel, M., Hadi, A., Irgi, M., Afif, M. R., & Simangunsong, F. (2022). Pertahanan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Increasing Factors For The Budget Allocation Of The Ministry Of Defense Within The 2022 State Budget. 149–167.
- Asrini, A. (2020). Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sektor

Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

- Aulia, E. N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 413-420. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Fanggidae, H. K., & Manafe, M. W. N. (2019). Evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada Pemerintah Daerah. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(02), 45-52.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.
- Herawati, A. F. (2013). Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sekto Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, S. (2022). Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu). Universitas Medan Area.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703-713.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2018). Analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31-43.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan (JBIK)*, 5(3).
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164-182.
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2686-438), 1-25.
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395-406.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 261-274.
- Susanti, Annis, Riadi Septa, S. D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, 5(3), 153-162. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jmms/article/view/1339>
- Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan

Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 5(3), 153–162.

Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). YUME : Journal of Management Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 170–177. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>

Untari, R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang. *UniversitasDian Nuswantoro: Semarang*.